

**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN
PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**Yandra Eka Rolanda
BP: 2005/65349**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

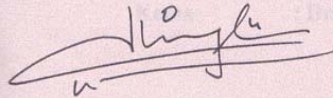
**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN PARIAMAN
TENGAH KOTA PARIAMAN**

Nama : Yandra Eka Rolanda
BP / NIM : 2005 / 65349
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, September 2013

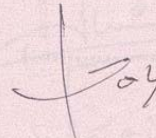
Disetujui oleh :

Pembimbing I



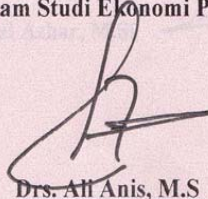
Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S
NIP. 19491215 197703 2 001

Pembimbing II



Novya Zulfa Riani, SE, M.Si
NIP : 19711164 200501 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, M.S
NIP : 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

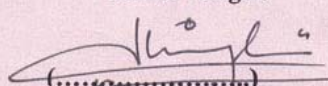
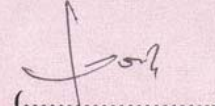
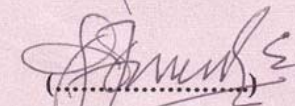
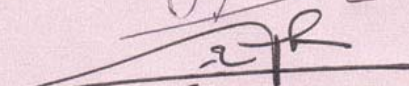
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**JUDUL : ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN NELAYAN DI
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA
PARIAMAN**

Nama : Yandra Eka Rolanda
BP / NIM : 2005 / 65349
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, September 2013

Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS	 (.....)
Sekretaris	: Novya Zulfa Riani, SE, M.Si	 (.....)
Anggota	: Drs. Akhirmen Bus, M.Si	 (.....)
Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	 (.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yandra Eka Rolanda
Nim/ Tahun Masuk : 65349/2005
Tempat/ Tanggal Lahir : Pariaman/08 Januari 1987
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat : Jln. Andalas 1 No. 53 Padang
No. HP/telp. : 085263362374
Judul Skripsi : Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Kecamatan
Pariaman Tengah Kota Pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2013

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
Rp 6000
BF190791197
DJP

Yandra Eka Rolanda
Nim/Bp. 65349/2005

ABSTRAK

YANDRA EKA ROLANDA 65349/2005 : Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Skripsi Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Ibu Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE. M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Untuk mengetahui distribusi pendapatan perseorangan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah dan (2) Untuk mengetahui distribusi pendapatan fungsional nelayan Kecamatan Pariaman Tengah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang pendapatan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah dimana pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variable, gejala, dan keadaan di suatu tempat.

Temuan penelitian ini adalah: Distribusi pendapatan perseorangan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah berada pada tingkat ketimpangan ringan yaitu dengan Gim Rasio Sebesar 0.3525. Temuan selanjutnya adalah Distribusi pendapatan fungsional nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah berada pada tingkat ketimpangan sebesar 0.2891 atau berada pada tingkat ketimpangan ringan.

Akhirnya dengan temuan penelitian ini penulis menyarankan Pemerintah hendaknya meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang beragam hal yang menyangkut masalah kesejahteraan dan perekonomian masyarakat keeil. Pemetintah dan pemilik modal hendaknya dapat lebih meningkatkan kerjasama khususnya dibidang kelautan clan perikanan agar fasilitas dan sarana prasarana yang berguna bagi pertumbuhan perekonomian bisa bertambah baik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan pads junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari alam kejahiliahan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Didorong oleh semua itu jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman**"

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Mima Tanjung, MS selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademis penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan skripsi. Selanjutnya tenma kasih kepada ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Di samping itu juga terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yulia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alianis, M.S sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dosen Penguji (Ibu Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS, dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si, Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si,) yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan

demikian demi kesempurnaan penulisan skripsi penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Orang tua serta keluarga yang terus memberikan do'a dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2005 tanpa terkecuali.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan, skripsi ini.

Akhirnya dengan Lulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI KERANGKA KONSEPTUAL DAN

HIPOTESIS

A. Kajian Teori.....	10
1. Pendapatan Perorangan	10
2. Pendapatan Fungsional	17
3. Jenis-jenis Distribusi Pendapatan	20
4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	21

B. Temuan Penelitian Sejenis	31
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Defenisi Operasional	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian-..	40
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	40
2. Analisis Deskriptif	42
1. Umur Nelayan	42
2. Status Perkawman	44
3. Jumlah Anak	45
4. Lama Berkerja Sebagai Nelayan	46
5. Pendidikan Nelayan	48
6. Jenis pekerjaan sampingan	48
7. Penyuluhan dari Pemerintah	49
8. Pendapatan Nelayan	50
3. Analisis Gini Rasio Distribusi Pendapatan Perorangan Nelayan di Kacamatan Pariaman Tengah	55
4. Analisis Gini Rasio Distribusi Pendapatan Fungsional Nelayan di Kacamatan Pariaman Tengah	57
B. Pembahasan	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan **60**

B. Saran **61**

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perikanan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang dapat memberikan kontribusi berarti terhadap perekonomian. Menurut data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (2009:78) berdasarkan harga konstan bahwa sub sektor perikanan menyumbang sekitar Rp 723.332,45 juta atau 4,45 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat. Ini berarti bahwa peluang untuk memperbesar kontribusi sub sektor perikanan bagi Sumatera Barat terbuka cukup luas, karena Sumatera Barat memiliki daerah pantai yang cukup panjang terutama di sebelah barat yang memanjang dari Kabupaten Pasaman hingga Kabupaten Pesisir Selatan.

Sub sektor perikanan yang terdapat di Sumatra Barat terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Bagi Sumatera Barat yang salah satu batas daerahnya adalah Samudera Hindia, telah mendorong sebagian penduduknya terutama di daerah pantai di Kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Mentawai, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki mata pencarian nelayan.

Kota Pariaman adalah salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi Sumatera Barat yang letaknya memanjang sepanjang Samudera Hindia memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) (2009:71) berdasarkan harga konstan bahwa sub sektor perikanan menyumbang sekitar Rp 146.823,28 juta atau 10,97 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman.

Walaupun kontribusinya relatif cukup besar terhadap perekonomian daerah dan didukung dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sub sektor perikanan, yaitu sebanyak 5.273 orang dengan rincian 3.847 orang tenaga kerja laki-laki dan 1.431 orang tenaga kerja perempuan tetapi jika dilihat dari kehidupan para nelayan pada umumnya nampak tidak juga berubah. Artinya, kehidupan ekonomi nelayan tetap saja sederhana dan tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini tentang jumlah nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman pada tahun 2009.

Tabel

Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

Kota Pariaman Per Kecamatan tahun 2009

No	Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Nelayan Buruh	Jumlah
1	Pariaman Tengah	249	21	204	474
2	Pariaman Utara	200	66	155	421
3	Pariaman selatan	144	12	102	258
	Jumlah	593	78	238	1.153

Sumber : Dinas Perikanan Kota Pariaman 2009

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh data bahwa jumlah nelayan di Kota Pariaman pada tahun 2009 sebanyak 1.153 orang yang terdiri dari 593 orang

nelayan penuh, 78 orang nelayan sambilan dan 238 nelayan buruh di Kota Pariaman.

Selain jumlah nelayan, alat tangkap yang digunakan di Kota Pariaman berbagai macam. Diantaranya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan
di Kota Pariaman

No	Nama Alat Tangkap	Jumlah
1	Payang	32
2	Pukat Tarik (Ikan)	10
3	Pukat Tarik (Udang)	20
4	Jaring insang tetap	33
5	Jaring insang hanyut	205
6	Jaring insang udang	35
7	Perahu dayung	53
8	Perahu motor tempel	345
9	Kapal motor	48
10	Jaring angkat (bagan)	27
11	Pancing ulur	134
12	Pancing tonda	24
13	Pancing rawai	20
	Jumlah	986

Sumber : Dinas Perikanan Kota Pariaman 2009

Dari Tabel 2, terlihat bahwa berbagai jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kota Pariaman diantaranya: Payang, Pukat tarik (ikan), pukat tarik (udang), jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring insang udang, , perahu dayung, perahu motor tempel, kapal motor, jaring angkat (bagan), pancing ulur, pancing tonda dan pancing rawai dengan jumlah alat tangkap sebanyak 986 buah. Alat tangkap yang paling banyak digunakan adalah perahu motor tempel sebanyak 345 buah dan alat tangkap yang paling sedikit digunakan oleh nelayan di Kota Pariaman pukat tarik (ikan) sebanyak 10 buah.

Kecamatan Pariaman Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Pariaman yang memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Mata pencarian sebagian penduduk di daerah tersebut adalah sebagai nelayan, baik nelayan penuh, nelayan sambilan dan nelayan buruh.

Sub sektor perikanan bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman menjadi penopang kehidupan mereka dan secara perorangan masyarakat tersebut memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan mata pencarian sebagai nelayan. Sedangkan bagi pemilik modal pendapatan mereka diperoleh dari mengelola alat tangkap (bagan, kapal tonda, dan payang) pengelola secara fungsional ini dijadikan sebagai tulang punggung kehidupan mereka. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya penduduk yang berusaha di bidang perikanan laut. Sebagaimana dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)
di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun 2010

Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Nelayan Buruh	Jumlah
Pariaman Tengah	249	21	204	474

Sumber : Dinas Perikanan Kota Pariaman 2009

Berdasarkan Tabel 3, tentang penduduk diperoleh data bahwa jumlah nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman pada tahun 2009 sebanyak 474 orang yang terdiri dari 249 orang nelayan penuh, 21 orang nelayan sambilan dan 204 nelayan buruh.

Berdasarkan observasi awal, fenomena distribusi pendapatan nelayan yang terjadi di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Pendapatan Nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah
Kota Pariaman

No	Nama	Pendapatan per minggu (Rp)		
		Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Nelayan Buruh
1	Ujang Rojer	450.000,-		165.000,-
2	Nofendi			
3	Safrudin		220.000,-	
4	Khairul		225.000,-	
5	Erwan	500.000,-		
6	Erizal(Dede)			125.000,-
7	Rinaldi			175.000,-
8	Ras sapril		235.000,-	
9	Jul Ogek		230.000,-	
10	Hermansyah (Badu)			140.000,-
Jumlah		950.000,-	910.000,-	605.000,-
Rata-rata		$\frac{950.000,-}{2} = 475$	$\frac{910.000,-}{4} = 227.50$	$\frac{605.000,-}{4} = 151.250$

Sumber: Wawancara di lapangan, 2009

Berdasarkan Tabel 4, pendapatan nelayan kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, rata-rata pendapatan nelayan tersebut berkisar dari Rp 125.000,- sampai Rp 500.000,-. Pendapatan terendah dari wawancara dengan nelayan adalah sebesar Rp 125.000,- dan pendapatan tertinggi Rp 500.000,- per minggu. Perbedaan pendapatan tersebut disebabkan oleh masing-masing nelayan bekerja sebagai nelayan tradisional dan sebagai nelayan pemilik modal. Pada umumnya nelayan tradisional memperoleh pendapatan di bawah pendapatan pemilik modal (pendapatan fungsional). Dimana pendapatan rata-rata nelayan pemilik modal

(nelayan penuh) adalah sebesar Rp 475.000,- per minggu. Sedangkan pendapatan rata-rata nelayan sambilan adalah Rp 227.500,- per minggu dan pendapatan rata-rata nelayan buruh adalah Rp 151.250,- per minggunya. Hal tersebut jauh dibawah Upah Minimum Regional Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 880.000 per bulan

Distribusi pendapatan perorangan menurut Todaro (2003:222) merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan.

Sedangkan, distribusi pendapatan fungsional menurut Todaro (2003:222) merupakan ukuran distribusi pendapatan fungsional ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan merupakan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik).

Selain itu, masih menurut Todaro (2003:223), distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh pendidikan para nelayan, sebagian besar nelayan beranggapan

untuk menjadi seorang nelayan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena menjadi seorang nelayan hanya butuh keahlian dalam bidang berenang. Selanjutnya, alat tangkap yang digunakan nelayan juga mempengaruhi distribusi pendapatan yang meliputi distribusi perorangan dan distribusi fungsional, alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan juga bermacam-macam, diantaranya pukot kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing. Penggunaan alat tangkap tersebut tidak merata pada masing-masing kecamatan. Penggunaan jumlah alat penangkapan ikan menurut jenis alat tangkap ikan dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Alat Perlengkapan Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan
di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman

Kecamatan	Jenis Alat Tangkap				
	Pukat Kantong	Jaring Insang	Jaring Angkat	Pancing	Lampara Dasar
Kec. Pariaman Tengah	30	23	17	18	4

Sumber : Dinas Perikanan Kota Pariaman 2009

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa alat tangkap yang banyak digunakan di kecamatan Pariaman Tengah adalah pukot kantong sebanyak 30 unit. Alat tangkap yang paling sedikit digunakan oleh nelayan di kecamatan Pariaman Tengah adalah lampara dasar sebanyak 4 unit.

Kecamatan Pariaman Tengah memiliki potensi perikanan laut yang tinggi dan jumlah nelayan yang cukup banyak, seharusnya kehidupan dan pendapatan nelayan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup karena telah bekerja setiap hari. tetapi pada kenyataanya pendapatan masyarakat nelayan di kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tidak sesuai dengan potensi laut yang dimiliki

dan perbedaan pendapatan serta pendistribusian antara pendapatan perorangan dengan pendapatan pemilik modal atau pemilik faktor-faktor produksi. Fenomena ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatan hasil wawancara di lapangan seperti yang tertera di tabel 4. Dimana pendapatan rata-rata nelayan pemilik modal (nelayan penuh) adalah sebesar Rp 475.000,- per minggu. Sedangkan pendapatan rata-rata nelayan sambilan adalah Rp 227.500,- per minggu dan pendapatan rata-rata nelayan buruh adalah Rp 151.250,- per minggunya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kehidupan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah kota Pariaman yang dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul :
 “ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah distribusi pendapatan perorangann nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah
2. Bagaimanakah distribusi pendapatan fungsional nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui distribusi pendapat nelayan Kecamatan Pariaman Tengah, tujuan lebih rinci adalah

1. Untuk mengetahui distribusi pendapatan perseorangan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah.
2. Untuk mengetahui distribusi pendapatan fungsional nelayan Kecamatan Pariaman Tengah.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi peneliti sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Strata Satu (SI) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ekonomi mikro.
3. Dapat dijadikan masukan kepada pemerintah terutama Dinas Perikanan dalam menyusun perencanaan yang berhubungan dengan masalah pendistribusian pendapatan nelayan di Kota Pariaman khususnya dan di Sumatra Barat umumnya.
4. Dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut tentang distribusi pendapatan nelayan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

1. Kajian Teori

a. Pendapatan Perorangan

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta pada awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya yang dikonsumsi.

Selain itu, menurut Winardi dalam Oktavianus (2007:20) pendapatan (*income*) secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas.

Pendapatan (*income*) dari seseorang (rumah tangga) adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi (Boediono;1982:140). Ini menegaskan bahwa sektor produksi tersebut juga membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input dalam rangka proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar.

Secara singkat faktor pendapatan seseorang ditentukan oleh jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki dan harga masing-

masing faktor produksi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pedesaan umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pendapatan tersebut adalah pendapatan yang berasal dari dalam usaha tani melalui kegiatan usaha tani (*farm activities*) dan berasal dari luar usaha tani melalui kegiatan non usaha tani (*non farm activities*). Pendapatan usaha tani merupakan suatu bentuk imbalan dari jasa pengelolaan (petani), tenaga kerja dan modal yang dimiliki (termasuk didalamnya lahan), yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dalam usaha tani (Soekartawi; 1986:116).

Selanjutnya, pendapatan di luar usaha tani adalah imbalan yang diperoleh akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar usaha tani, pendapatan di dalam usaha tani merupakan balas jasa faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal dan jasa pengolahan. Pendapatan (Y) diperoleh dari selisih penerimaan ($TR=Total\ Revenue$) dari penjualan komoditas (Q) yang dihasilkan dengan jumlah biaya ($TC=Total\ Cost$) yang dikeluarkan untuk menghasilkan komoditas tersebut (Boediono;1982:89), maka secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y=TR-TC \dots\dots\dots(1)$$

$$=P_oQ-P_nN \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan usaha tani

P_o = Harga output

Q = Output

P_n = Harga input

N = Input

Pendapatan petani menurut Adiwilaga (1980:115, merupakan pendapatan yang bisa berupa padi, uang dan juga bisa berupa barang lain yang bukan padi. Karena keterbatasan petani dalam menggarap lahan pertanian menyebabkan sumber pendapatan mereka pada umumnya tidak berasal dari sektor pertanian saja, tetapi mereka juga berusaha memperoleh pendapatan dari sumber lain di luar usaha tani.

Soekartawi (1986:78), mengatakan bahwa jika sumber pendapatan keluarga petani berasal dari dua sumber yaitu usaha tani dan non usaha tani, maka total pendapatan keluarga tani tersebut adalah :

$$Y_{\text{tot}} = Y_1 + Y_2 \dots\dots\dots(3)$$

$$= (TR_1 - TC_1) + (TR_2 - TC_2) \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

Y_1 = Pendapatan usaha tani

Y_2 = Pendapatan non usaha tani

Dikutip oleh Asmadia (2004:11) ada beberapa konsep untuk menentukan perhitungan pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_B = PQ - \sum r_i x_i \dots\dots\dots(5)$$

Y_B = Pendapatan bersih

P = Harga output

Q = Harga total

r_i = Harga input ke (i)

x_i = Jumlah input ke (i)

$I = 1, 2, 3, \dots, n$

- b. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari semua cabang dan sumber di dalam usaha tani maupun di luar usaha tani selama satu tahun. Untuk menghitung pendapatan kotor digunakan rumus sebagai berikut :

$$YK = P \cdot Q \dots\dots\dots(6)$$

Dimana :

YK = Pendapatan kotor

P = Harga output

Q = total output

Selanjutnya, untuk menetapkan pendapatan kotor dari tiap-tiap cabang usaha tani maupun diluar usaha tani (Soekartawi;1986:80), sebagai berikut:

1. Jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan dengan mengingat akan adanya penerimaan pada permulaan dan akhir tahun.
2. Nilai dari pengeluaran-pengeluaran berupa bahan-bahan dari usaha tani, keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi dan lain-lain.
3. Nilai dan bahan-bahan yang dihasilkan dari usaha tani sendiri sebagai bangunan tetap misalnya kayu untuk perumahan atau alat-alat lainnya.
4. Hasil sewa alat-alat dan upah tenaga kerja keluarga dan pihak lain.

Biaya usaha tani adalah biaya yang betul-betul dikeluarkan selama membiayai usaha teninya yaitu dalam jangka waktu satu tahun. Dikutip oleh Asmadia (2004:12) biaya-biaya tersebut adalah :

- A. Biaya sarana produksi antara lain :bibit,pupuk, obat-obatan (pestisida) dan pengeluaran lainnya.
- B. Upah tenaga kerja, baik tenaga kerja di luar keluarga maupun tenaga kerja dalam keluarga yang diperhitungkan berdasarkan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja di luar keluarga.
- C. Pengeluaran-pengeluaran tertentu berupa bahan untuk kepentingan usaha tani, misalnya upacara selamatan menjelang musim tanam dan lainnya.
- D. Penyusutan, yang merupakan pengganti kerugian atau pengurangan nilai disebabkan karena waktu dan cara penggunaan dari semua modal tetap seperti bangunan, alat-alat, mesin-mesin, dan sebagainya. Modal tanah biasanya tidak dikenakan biaya penyusutan karena dengan pemeliharaan dan cara penggunaan yang baik maka nilai tanah tidak akan berkurang, bahkan mungkin akan terus bertambah.

Mosher dikutip oleh Asmadia (2004:13) menyatakan bahwa pendapatan usaha tani sangat tergantung kepada salah satu yang diikutsertakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, produktivitas lahan garapan, kemampuan pengarahannya (manajemen), ukuran keluarga, kegiatan petani didalam penggunaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, benih dan sarana produksi lainnya. Kegiatan usaha tani bertujuan untuk mencapai produksi yang lebih tinggi di bidang pertanian. Petani

mengalokasikan pendapatannya dalam berbagai kegunaan seperti halnya untuk biaya produksi untuk periode berikutnya, tabungan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pendapatan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan suatu usaha dan juga merupakan faktor yang menentukan dalam keberlangsungan suatu usaha. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau badan usaha selama jangka waktu tertentu.

Dalam Ensiklopedi di Indonesia yang disusun oleh Shadily (1989:11) menyatakan bahwa pendapatan seseorang diartikan sebagai jumlah uang dan barang yang diterima sebagai hasil kerja yang dilakukan. Apabila dilihat dari sudut pandang nelayan, maka pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima nelayan dalam melakukan kegiatan melaut.

Jhingan (2003:31), menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu, oleh karena itu pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan berubahnya kemampuan seseorang. Dengan pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk keperluan hidup atau untuk mencapai kepuasan.

Perhitungan pendapatan keluarga menurut Mubyarto (1985:67) adalah semua hasil yang diterima oleh semua anggota keluarga melalui berbagai jenis usaha kegiatan ekonomi. Tolak ukur yang digunakan adalah pendapatan pertahun dari keluarga tersebut. Pendapatan keluarga dapat dilihat dalam

bentuk uang, dapat pula dalam bentuk barang atau fasilitas misalna, rumah dinas, pengobatan gratis.

Menurut Mubyarto (1985:92) pendapatan yang diterima dapat dibedakan menjadi beberapa bagian :

“Pendapatan juga dikelompokkan dalam sektor formal, informal dan subsistem. Pendapatan sektor formal yaitu segala penghasilan baik berupa uang ataupun barang yang sifatnya regular yang diterima biasanya balas jasa dan kontraprestasi dari sektor formal. Pendapatan dari sektor informal yaitu segala penghasilan baik berupa uang atau kontraprestasi dari sektor informal. Pendapatan sektor subsistem terjadi apabila produksi dan konsumsi terletak di tangan suatu masyarakat kecil.”

Dari uraian di atas, menggambarkan bahwa pendapatan itu merupakan masukan dari masing-masing keluarga yang mana keadaan keluarga yang satu berbeda dengan keluarga yang lain, dan dipengaruhi oleh aktivitas keluarga tersebut baik jenis maupun macam kegiatannya. Kegiatan dan aktivitas inilah yang membedakan dan mempengaruhi pendapatan keluarga sehingga menimbulkan klasifikasi pendapatan masyarakat tinggi, sedang dan rendah.

Pengertian pendapatan menurut Valerry J. Hull yang dikutip oleh Nawi (1995:9) pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat posisi ekonomi keluarga yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga (termasuk semua barang dan hewan peliharaan), dipakai untuk membagi kedalam tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok pendapatan, yaitu pendapatan sedang dan pendapatan rendah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan perorangan merupakan pendapatan keseluruhan dari berbagai sumber penghasilan yang secara actual diterima oleh seseorang atau rumah tangga.

b. Pendapatan fungsional

Adapun menurut David Ricardo dalam Jhingan (1999:88) teori distribusi pendapatan fungsional didasarkan pada asumsi bahwa:

3. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu distribusi industri.
4. "Law of adminising return" berlaku bagi tanah
5. Persediaan tanah adalah tetap
6. permintaan akan gandum benar-benar inelastic
7. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variable
8. keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu (given)
9. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
10. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
11. Permintaan akan buruh tergantung pada penumpukan modal, baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktifitas marginal tenaga kerja
12. Terdapat persaingan yang sempurna
13. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Berdasarkan teori tersebut yang saling berhubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yakni tanah, kapitalis dan buruh atau pemilik tanah, pemilik stok capital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang dipekerjakannya. Seluruh pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok masyarakat yang masing-masingnya sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah.

Sewa per unit buruh adalah perbedaan antara produk rata-rata dan produk marginal. Keseluruhan sewa sama dengan perbedaan antara produk rata-rata dengan produk marginal dikalikan dengan banyaknya tenaga kerja

dan modal yang digunakan dalam pengolahan tanah. Tingkat upah ditentukan oleh cadangan upah dibagi dengan jumlah buruh (David Ricardo dalam Jhingan,1999:89).

Jadi dari keseluruhan gandum yang dihasilkan dan dijual, sewa mempunyai prioritas utama dan sisanya (hasil dikurangi sewa) dibagi-bagikan sebagai upah dan keuntungan, sementara bunga termasuk dalam keuntungan.

Menurut Sukirno (1998:64) distribusi pendapatan di beberapa Negara terdapat dua analisis di antaranya *distribusi pendapatan relatif* yang merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan *distribusi pendapatan mutlak* yaitu persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu.

Menganalisis keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara, analisisnya mengenai beberapa gambaran mengenai distribusi pendapatan relatif maupun distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang mereka terima. Sedangkan yang dimaksudkan dengan distribusi pendapatan mutlak adalah tingkat pendapatan tertentu atau persentase jumlah penduduk yang berpendapatan mencapai suatu tingkatan tertentu atau kurang dari padanya. Dalam pengertian relatif golongan penerima pendapatan dibagi dalam kelas-kelas dengan persentase tertentu

pula. Pengertian mutlak mempergunakan pendekatan garis kemiskinan . Jadi penduduk yang tidak memenuhi garis tersebut maka akan dikategorikan miskin.

Masalah pemerataan akan tetap ada selama proses pembangunan berlansung, sebenarnya secara absolute pendapatan dari golongan yang berpendapatan rendah tidak menurun bahkan meningkat. Akan tetapi pendapatan golongan yang berpendapatan tinggi akan sangat meningkat, maka kepincangan atau ketimpangan pembagian pendapatan menjadi mencolok. Kemampuan golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan seharusnya lebih cepat dibandingkan dengan golongan yang berpendapatan lebih tinggi. Apabila tidak demikian, disparitas pendapatan antar golongan berpendapatan rendah dan tinggi semakin besar. Ada beberapa kenyataan bahwa pendapatan masyarakat kelompok menengah dan atas mempunyai kenaikan lebih cepat dan kelompok miskin melalui tahap-tahap pembangunan.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa perbedaan pendapatan timbul karena pendapatan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak yang memiliki barang modal yang jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Perbedaan pendapatan karena kepemilikan awal faktor produksi tersebut menurut teori Neo Klasikal akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut akan menetes (*trackle down*) dan menyebar sehingga

menimbulkan keseimbangan baru. Apabila setelah proses tersebut masih ada perbedaan yang cukup timpang, maka dapat dilakukan pendekatan Keynesian yaitu melalui sistem perpajakan dan subsidi perpajakan. Dengan adanya subsidi maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk retrebusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya, kesenjangan distribusi pendapatan merupakan suatu masalah pokok dalam pembangunan karena distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau tidaknya hasil pembangunan yang dilakukan.

c. Jenis - jenis Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan seseorang atau distribusi ukuran pendapatan merupakan indikator yang sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh individu atau rumah tangga, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.

Menurut Todaro (2003:222) distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah atau warisan.

Sedangkan distribusi pendapatan fungsional menurut todaro (2003:222) merupakan ukuran distribusi pendapatan fungsional ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan merupakan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik).

d. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai tolak ukur untuk ketidakmerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi pendapatan yang dimaksud.

Masalah distribusi pendapatan sering diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:194) ketimpangan adalah kepincangan, hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, tedak beres), tidak merata. Jadi distribusi pendapatan adalah pendapatan yang tidak terdistribusi secara merata pada sekelompok masyarakat.

Masalah ketimpangan pembagian pendapatan sebenarnya berkaitan erat dengan perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat melalui balas jasa faktor produksinya. Pemanfaatan faktor produksi tersebut

akan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan perbedaan yang mencolok antar golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Golongan yang berpendapatan tinggi mengurai hampir seluruh faktor produksi dan tenaga kerja yang merupakan faktor penentu pembagian pendapatan.

Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang menurut Adelman & Morris (1973) dalam Arsyad (1999:226-227) sebagai berikut:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunkan pendapatan per kapita;
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Inflasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
5. Rendahnya mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang;
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lainnya.

Selain faktor-faktor di atas, Adelman dan Morris (dalam Melani, 2008:31), ketimpangan juga disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- A. Sistem perekonomian, semakin besar peran sektor swasta dalam perekonomian maka semakin timpang distribusi pendapatan.

- B. Proporsi faktor produksi, sangat mempengaruhi distribusi pendapatan, salah satu faktor produksi yang penting adalah tenaga kerja, laju pertumbuhan tenaga kerja yang sangat tinggi akan menurunkan tingkat upah, pada giliran berikutnya hal ini akan meningkatkan ketimpangan distribusi / pendapatan.
- C. Teknologi, dewasa ini teknologi yang ditransfer ke negara-negara berkembang kebanyakan bersifat capital intensif, sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan akan menyebabkan pengangguran. Dengan demikian penggunaan teknologi yang padat modal akan memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan.
- D. Kebijakan fiskal, salah satu aspek kebijakan fiskal adalah penerimaan negara dari sisi pajak. Penggunaan pajak ini dapat digunakan untuk memberikan berbagai pelayanan public kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pembebasan biaya sekolah, pembebasan biaya listrik dan air bersih. Hal ini bias membantu masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga mengurangi dampak ketimpangan.
- E. Strategi pembangunan, strategi substitusi impor akan cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dibandingkan dengan distribusi orientasi ekspor. Karena dalam strategi substitusi impor harga barang-barang dalam negeri tinggi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Akibatnya dampak ketimpangan distribusi pendapatan akan bertambah parah.

Jadi, ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: penambahan penduduk yang tinggi, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor, buruknya nilai tukar, hancurnya industri kerajinan rakyat, sistem perekonomian, proporsi faktor produksi, teknologi, kebijakan fiskal dan strategi pembangunan.

Hasil penelitian Kuznet dalam Riza (2003:22) menemukan bahwa faktor utama yang menentukan ketidakmerataan pendapatan masyarakat adalah faktor pendapatan. Dengan menggunakan data lintas negara ditemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dan diukur dari tingkat pendapatan pada tahap awal pembangunan. Namun jika pertumbuhan ekonomi sudah mantap maka terdapat kecendrungan peningkatan pendapatan yang diikuti dengan penurunan ketidakmerataan pendapatan dalam distribusi pendapatan.

Selain tingkat pendapatan per kapita, Kuznet menemukan juga bahwa penurunan peran sektor pertanian terhadap pendapatan nasional suatu negara akan cenderung meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena dalam proses *industrialisasi* terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan juga ditentukan oleh faktor pendidikan dan pertumbuhan penduduk. Dimana pada daerah yang tidak merata distribusi pendapatannya dan tidak merata kesempatan dari

memperoleh pendidikan tidak sangat seimbang dan juga tingkat pertumbuhan penduduk akan tinggi karena tingkat pendidikan yang rendah akan cenderung memiliki keluarga yang besar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini nantinya akan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat karena tidak sebanding antara tingkat pendapatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Faktor lain yang menentukan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah faktor kelembagaan dan kebijakan pemerintah akan menarik efek distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ini akan dilaksanakan pada strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

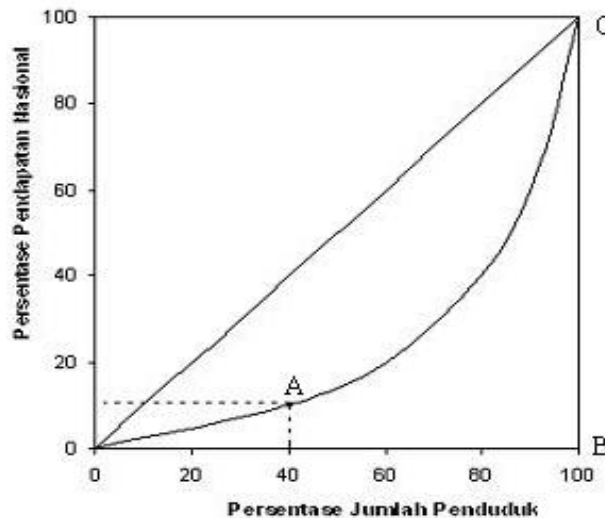
Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin turun ketidakmerataan distribusi pendapatan dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan atau kualitas sumber daya manusia maka ketidakmerataan distribusi pendapatan akan semakin timpang.

Patut ditegaskan bahwa ukuran ketimpangan distribusi pendapatan meliputi distribusi pendapatan yang mencerminkan pemerataan atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria dan tolak ukur untuk menilai pemerataan (parah atau tidaknya ketimpangan) distribusi pendapatan tersebut.

Tiga tolak ukur yang paling lazim untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro;2003:223) sebagai berikut :

5. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk, kurva Lorenz terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada garis diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat pada garis diagonal (semakin lurus) menyatakan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan yang semakin timpang atau tidak merata.



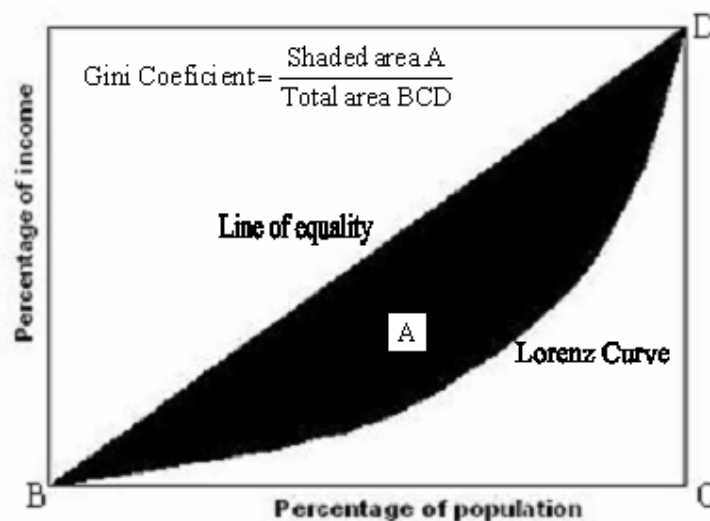
Gambar 1 Kurva Lorenz

Titik A mencerminkan 40% penduduk berpendapatan terendah menghasilkan atau hanya memiliki 10% pendapatan nasional.

6. Koefisien Gini (*Coefission Gini*) atau Gini Rasio

Koefisien Gini atau Gini Rasio merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 – 0,57, sedangkan untuk distribusi pendapatan yang relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Indek atau Gini Rasio adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisiennya, maka semakin baik atau merata distribusi pendapatan. dan sebaliknya, semakin besar (semakin mendeekati 1) koefisiennya, maka distribusi pendapatan yang semakin timpang.



Gambar 2 Interpretasi Koefisien Gini

Angka Rasio gini dapat ditaksir secara langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan dari luas area yang terletak antara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga DBC. (Todaro;2000:226). Dipilih Gini Rasio sebagai alat pengujian karena gini rasio memiliki beberapa kelebihan, sebagai berikut :

- a. Merupakan indikator yang paling terkenal dan umum digunakan;
- b. Merupakan variable yang dinamis dalam mengukur ketidakmerataan pendapatan baik antar daerah maupun antar sektor dalam suatu negara;
- c. Menunjukkan kecenderungan yang sama menurut kurun waktu dan antar daerah yang dicapai dengan menggunakan ukuran yang berbeda.

Rumus Gini Rasio menurut BPS (2006:8) adalah sebagai berikut :

$$GR = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k f_i (y_i^0 + y_{i-1}^0)}{\sum_{i=1}^k f_i} \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan :

Y_i = Proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke-i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas

Beberapa kriteria yang dienuhi oleh koefisien Gini bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (BPS;2006:8) antara lain :

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*), ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.

2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence), jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah jika kondisi lain tetap (ceteris paribus).
3. Simetris, jika bertukarnya tempat tingkat pendapatan seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat (BPS;2006:8) antara lain:

1. Dapat didekomposisikan, bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Koefisien Gini tidak dapat didekomposisikan atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai koefisien Gini dari sub kelompok masyarakat.
2. Dapat diuji secara statistic, seseorang harus dapat menguji signifikan perubahan indeks antar waktu.

Untuk melihat tinggi rendahnya distribusi pendapatan nelayan Kecamatan Pariaman tengah Kota Pariaman dapat diukur dengan menggunakan Gini rasio. Menurut Todaro (2000:88) ada spesifikasi nilai Gini Rasio yaitu :

- a. 0,20 – 0,35 yaitu ketimpangan ringan
- b. 0,36 – 0,49 yaitu ketimpangan sedang

- c. 0,50 – 0,70 yaitu ketimpangan tinggi

Atau secara matematis :

$$GR = \frac{\text{Luas dibawah } X}{\text{Segitiga ABC}} = \frac{X}{N+Y} \dots\dots\dots(8)$$

c. Kriteria Bank Dunia (*World Bank*)

Bank dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin), 40 persen penduduk berpendapata sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (penduduk terkaya).

Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan 40 persen penduduk berpendaptan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dikatakan sedang apabila 40 persen penduduk termiskin menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional, maka ketimpangan dikatakan lunak atau distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata (Dumary;1996:55).

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas ada tiga kriteria yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu :

Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia (*World Bank*).

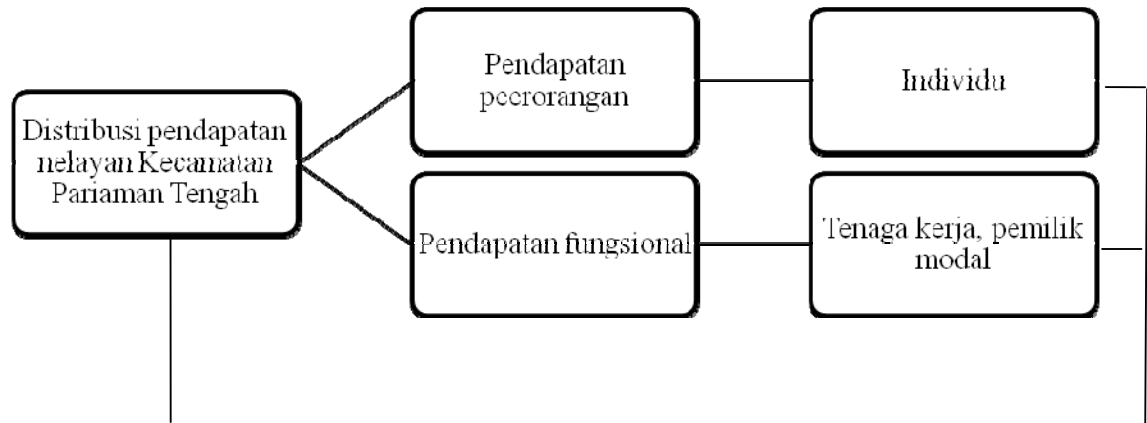
2. Temuan Penelitian Sejenis

Hasil penelitian yang sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. dibawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang menghasilkan beberapa kesimpulan :

- A. Oktavianus (2007) “Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa distribusi pendapatan nelayan di kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan indeks Gini diperoleh hasil 0,29, ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada sub sektor perikanan adalah sedang. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.
- B. Yasril (2004) “Analisis Penghasilan Masyarakat Nelayan di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan ketimpangan melalui indeks Gini pendapatan nelayan sebesar 0,31 ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan pada sub sektor perikanan adalah sedang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah lebih memfokuskan pada distribusi pendapatan perorangan dan distribusi pendapatan fungsional nelayan.
- C. Dina Tias Sriyadi (2007) “Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dan Distriibusi Penguasaan Lahan Di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga tergolong rendah menurut analisis gini dan kriteria bank dunia dengan hasil 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati 17,13% dari total pendapatan masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis mellihat distribusi pendapatan nelayan pada daerah penelitian yang berbeda dengan temuan sejenis ini.

3. Kerangka Konseptual



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian Distribusi Pendapatan Nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*) merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan.

Distribusi Pendapatan Fungsional yaitu distribusi yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Dalam distribusi pendapatan fungsional ini dimaksudkan yaitu nelayan yang sebagai pemilik modal seperti pemilik kapal, pemilik bagan dan pemilik

pancing yang pendapatan diperoleh dari penggunaan kapal yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan di laut.

4. Hipotesis

Distribusi pendapatan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Distribusi pendapatan perorangan nelayan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berada pada ketimpangan ringan.
2. Distribusi pendapatan fungsional nelayan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berada pada ketimpangan ringan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Distribusi pendapatan terbagi menjadi dua jenis yaitu distribusi pendapatan perorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Sedangkan distribusi pendapatan fungsional memberikan kerangka analisis kebijaksanaan yang menjelaskan keadilan distribusi pendapatan berdasarkan kepemilikan faktor produksi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 83 responden nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan hasil yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan simpulan antara lain :

1. Distribusi pendapatan perorangann nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah berada pada tingkat ketimpangan ringan yaitu dengan Gini Rasio Sebesar 0.3525. Hal ini menunjukan bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah baik dari mata pencarian utama sebagai nelayan maupun dari pekerjaan sampingan lainnya tidak terlalu mencolok perbedaan antara nelayan yang berpenghasilan rendah dan nelayan yang berpenghasilan tinggi

2. Distribusi pendapatan fungsional nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah berada pada tingkat ketimpangan sebesar 0.2891 atau berada pada tingkat ketimpangan rendah. Ini berarti jumlah pendapatan antara nelayan baik nelayan pemilik modal maupun nelayan pekerja masih berada pada tingkat perbedaan yang tidak begitu besar.

B. SARAN

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran berikut:

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang beragam hal yang menyangkut masalah kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kecil.
2. Pemerintah dan pemilik modal hendaknya dapat lebih meningkatkan kerjasama khususnya dibidang kelautan dan perikanan agar fasilitas dan sarana prasarana yang berguna bagi pertumbuhan perekonomian bisa bertambah baik.
3. Pemerintah seharusnya memberikan iklim positif dalam penciptaan langsung kerja, seperti melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Pembukaan investasi baru. Pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja. Memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

4. Ketimpangan pendapatan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang telah penulis teliti adalah bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dari kajian yang peneliti teliti. Maka, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk dapat mengkaji dan meneliti faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, investasi, tenaga kerja dan tingkat kesehatan sehingga dapat diketahui seberapa besar ketimpangan pendapatan nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah untuk waktu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A Kosim. 1980. Ekonomi Pertanian. Edisi Kedua. PT. Soron Pacenongan: Jakarta.
- Arikonto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian. Rineka Opta: Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Yogyakarta.
- Asmadia, Rory. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta: Padang.
- Boediono. 1982. Teori Pertumbuhan Penduduk. LP3ES: Jakarta.
- BPS. 2008. Gini Rasio Kota Padang. Badan Pusat Statistik: Padang.
- Pesisir Selatan Dalam Angka. Biro Pusat Statistik Pesisir Selatan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. 2008. Data Statistik Perikanan dan Kelautan Kab. Pesisir Selatan: Paianan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. Kecamatan Sutura. 2008. Data Statistik Perikanan dan Kelautan Kec. Sutura Sutura. Durnain. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga ; Jakarta.
- Im an. Prasetya. 1999. Logika dan Prosedur Penelitian. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara : Jakarta.*
- Jhingan, ML. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafindo Persndq: Jakarta. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lestari, Rini. 2005. Pengaruh Pendidikan Orang Tua, Jumlah Anak Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Nelayan di Kecamatan Padang Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang: Padang.*
- Nlelani, Anggun E.Y. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan Perkapita di Sumareta Barat. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang: Padang.*
- Mubyarto, 1985. Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi Keempat: Jakarta.*
- Muttaqin, Hidayatullah. 2006. Peranan Negara dan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Idiologi. Edisi September.
- Nawi, Marnis. 1995. Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempilnya Lahan Pertanian Kelurahan Anduring Propinsi Sumatera Barat. Debdikbud Sumbar.*